



SISTEM EKONOMI INDONESIA

JEANE MANTIRI, SAB.,MAP
NANCY ONIBALA, S.AP.,MPA

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Jeane Mantiri, SAB.,MAP
Nancy Onibala, S.AP.,MPA



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Penulis:

Jeane Mantiri, SAB.,MAP

Nancy Onibala, S.AP.,MPA

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,100, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-203-8

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun buku ajar Mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Buku ini berisi materi mata kuliah Ekonomi Indonesia yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar, mahasiswa, maupun pembaca pada umumnya untuk menambah wawasan dan ilmu berkenaan dengan teori dan praktek perekonomian Indonesia. Penyusunan buku ini dilakukan berdasarkan acuan berbagai sumber literatur dan pengalaman mengajar penulis.

Buku **Sistem** Ekonomi Indonesia adalah sebagai penambah khasanah keilmuan tentang ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai panduan oleh mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas yang membutuhkannya. Referensi ini sangat dibutuhkan mahasiswa, dalam menambah wawasan dan pendalaman terkait perekonomian Indonesia.

Dalam rangka mendukung kajian ekonomi Indonesia, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mencari referensi yang terkait dengan materi kajian ekonomi. Penulisan buku ini sangat penting untuk dilaksanakannya. Ekonomi Indonesia adalah hal penting dan menjadi dasar dalam memahami sistem ekonomi. Melihat pentingnya keberadaan bisnis terutama dalam perkembangan sistem perekonomian dunia dan aspek pengambilan keputusan maka diperlukan pemahaman lebih mendalam agar pemahaman ekonomi lebih komprehensif. Pendekatan dalam buku ini berusaha mendudukan secara sistematis dan terstruktur mengenai perekonomian Indonesia, untuk selanjutnya para mahasiswa dan masyarakat mengembangkan lebih lanjut.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada keluarga tercinta yang rela memberikan sebagian waktu kepada penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan buku ini. Ucapan terimakasih dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan membantu penulisan buku ini. Berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan dalam buku ini. Kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan buku ini di masa depan. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi Indonesia.

Penulis menyadari bahwa bahan ajar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis menghargai dan mengharapkan kritik dan masukan demi perbaikan kualitas buku. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang proses pembelajaran mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia.

Tondano, November 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Karakteristik Perekonomian Indonesia	1
C. Pilihan Strategi Pembangunan Ekonomi	3
D. Peran Dan Kebijakan Pemerintah	5
BAB.II SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA.....	9
A. Pendahuluan.....	9
B. Periode Kolonial.....	10
C. Periode Kemerdekaan	13
D. Masa Terpimpin (1959 – 1966)	14
E. Masa Ekonomi Pancasila/ Order Baru (1966 – 1998)	16
F. Kegiatan Ekonomi Memanas (Overheated) Sejak 1990.....	21
BAB III TOKOH EKONOMI INDONESIA.....	29
A. Pendahuluan.....	29
B. Mohammad Hatta	29
C. Sumitro Djojohadikusumo	32
D. Widjojo Nitisastro	34
E. Sjahrir	35
F. Mubyarto	37
G. Boediono	41
BAB IV SISTEM EKONOMI.....	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Pengertian Sistem Ekonomi:	43
C. Macam-Macam Sistem Ekonomi	44
BAB V SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA.....	50
A. Pendahuluan.....	50
B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila.....	51
C. Sistem Ekonomi Kerakyatan	52
D. Dasar/Landasan Sistem Ekonomi Indonesia	53
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi Di Indonesia	54
BAB.VI PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	57

A. Pelaku-Pelaku Ekonomi.....	57
B. Perusahaan Menengah (Usm, Ism).....	60
C. Perkembangan Ukm.....	60
D. Peran Dan Fungsi Bagi Perekonomian.....	61
E. Analisis Kebijakan Yang Relevan.....	64
BAB VII KOPERASI DAN UMKM.....	66
A. Pengertian Koperasi	66
B. Sejarah Perkembangan Koperasi.....	67
C. Landasan Koperasi	68
D. Asas Koperasi.....	68
E. Tujuan Koperasi.....	68
F. Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia.....	69
G. Fungsi Koperasi	70
H. Usaha Micro, Kecil Dan Menengah (Ukm).....	70
I. Penyakit Yang Dihadapi Oleh Ukm	76
BAB VIII STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA	77
A. Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia.....	77
B. Proses Transformasi Struktur Perekonomian Indonesia.....	81
C. Proses Distribusi Pendapatan.....	83
D. ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFORMASI STRUKTURAL.....	87
BAB IX ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN).....	91
A. Pendahuluan.....	91
B. Fungsi Dan Peran Apbn.....	91
C. Struktur Dan Susunan Apbn	95
D. Prinsip-Prinsip Dalam Apbn	95
E. Instrumen Dan Analisis Kebijakan Fiskal	96
F. Surat Utang Negara (Sun).....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
TENTANG PENULIS.....	100

KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan Umum:

Agar mahasiswa mengenal dan memahami tentang tahap dan permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memperhatikan ciri khusus (karakteristik) Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara). Pembahasan menyangkut masalah akumulasi, alokasi, demografi dan distribusi lalu dilanjutkan dengan masalah strategi, peran serta kebijakan dalam dan luar negeri.

Tujuan Khusus :

- Agar mahasiswa mengetahui masalah-masalah yang menyertai proses pembangunan ekonomi di Indonesia
- Agar mahasiswa mengetahui pilihan strategis pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara)
- Agar mahasiswa memahami peran dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat makro, meso dan mikro dalam lingkup kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.

A. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB tapi juga adanya perubahan struktura. Perubahann struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi (pengembangan sdp secara kuantitatif dan kualitatif), segi alokasi (pola penggunaan sdp), segi institusional (kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat), segi distribusi (pola pembagian pendapatan nasional) (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

B. KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara) memiliki ciri-ciri khusus, yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda dengan negara-negara lain di dunia sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik sendiri. Yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia : Faktor Geografi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni manusia); terbentang dari 6⁰LU sampai 11⁰LS sepanjang 61.146 km., memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDm, kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975).

Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km², 70 persennya ($\pm 3,635,000$ km²) terdiri dari lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara

Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalu lintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

Menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja; kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

Faktor Demografi

Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah.

Mutu SDM rendah : $\pm 80\%$ angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996). Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk memproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

Faktor sosial, budaya dan politik

Sosial : Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogen) dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA).

Budaya : Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa “Timur” (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II), mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh (menganut) “budaya” Timur, budaya status orientation. Budaya status orientation bercirikan: semangat hidupnya mengejar pangkat, kedudukan, status (dengan simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu (jam karet). Lawannya “budaya” barat, budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya.

Budaya status orientation tidak produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial.

Politik : sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak).

Sisa-sisa pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otiriter) sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

Dari uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan.

Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

1. Potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.
2. Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.
3. Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik..

C. PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi (Budi Santoso, 1997).

Konsep pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1982).

Joseph Schumpeter membedakan dua latihan yaitu pertumbuhan ekonomi (growth) dan perkembangan ekonomi (development). Kedua-duanya adalah sumber dari peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda (Boediono, 1982).

Strategi Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau “teknologi” produksi itu sendiri.
- b. Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai Model Harrod Domar. Menurut kedua ekonomi ini, setiap penambahan stock kapital masyarakat (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (QP). di sini QP menunjukkan output

yang potensial bisa dihasilkan dengan stock kapital (kapasitas produksi) yang ada.

- c. Hubungan K dan Q^P : $Q^P = hK$ atau $1/h = K/Q^P$ $1/h$ =Capital output ratio (COR) koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan setiap unit output diperlukan berapa unit kapital.

Karena hubungan antara K dan Q^P adalah proposional, maka :

$$[Q^P : Q^P = h [K \text{ atau } 1/h = [K/ [Q^P$$

$1/h =$ Incremental capital output ratio (ICOR)

koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan tambahan setiap unit output diperlukan berapa unit tambahan kapital (investasi)

- d. Konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi. Contoh : petro dollar (kelebihan harga minyak) pertumbuhan ekonomi melonjak drastis dari 2,5% (sebelum dimulai Pelita) menjadi 7,0% (selama Pelita I, II dan Pertengahan Pelita III). Tapi mulai pasca Oil Boom maka pertumbuhan ekonom merosot sampai 2,5% (bersamaan resesi dunia tahun 1982) dan baru pulih kembali pada awal Pelita V mencapai 7,1% (1990).
- e. Sejak krisis moneter pertengahan tahun 1997 dimana terjadi capital flight besar-besaran, pertumbuhan ekonomi merosot dengan cepat, masingmasing 8,5%, 6,8%, 2,5% dan 1,4% (untuk triwulan I, II, III, dan IV tahun 1997). Tahun 1998 pertumbuhan menjadi negatif.

Strategi Perkembangan Ekonomi (Economic Development)

Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur (wiraswastaan). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan.

Syarat-syarat terjadinya inovasi (perkembangan ekonomi)

- a. Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (entrepreneur) di masyarakat
- b. Harus ada lingkungan sosial, politik dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi
- c. Harus ada cadangan atau suplai ide-ide baru secara cukup.
- d. Harus ada sistem prekreditasi yang bisa menyediakann dana bagi para entrepreneur.

Ada lima kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu :

- a. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.
- b. Diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru
- c. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- d. Pembukaan daerah-daerah pasar baru
- e. Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi.

Disini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan maini efisien, yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi.

Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara

Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).

Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regional) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).

Dilihat dari dimensi ekonomi-regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangann mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya asimetri (ketidakserasian) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

Menurut Laoede M. Kamaludin, penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang dapat dikembangkan :

- a. Pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi, pusat pendidikan, jasa dan pariwisata. Ini tepat diterapkan di P. Jawa, Bali dan Batam.
- b. Pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan. Ini lebih tepat dikembangkan di kawasan timur Indonesia dan kepulauan kecil di Sumatera.
- c. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya mineral dan tanaman industri dapat dikembangkan di pulau Sumatera (Kompas, 25-5- 1999) Mengapa pembangunan berwawasan nusantara penting. Seiring dengan makin berkembangnya dan makin membesarnya jumlah penduduk maka kita perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk menggali persediaan bahan mentah dan sumber-sumber energi yang masih tersimpan banyak dalam flora dan fauna di lautan. Dalam waktu mendatang laut akan merupakan ladang utama dalam manusia mencari bahan makanan dan keperluan hidup (Sutjipto, 1995).

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Sumber daya hayati Indonesia memiliki potensi lestari 4 juta ton dalam airlaut, 1,5 ton dalam air budidaya, 0,8 juta ton dalam air tawar (Kartili, J, A., 1983).

D. PERAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

1. Peran Pemerintah

Peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat (negara sosialis), ada yang lemah (negara kapitalis). Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengann mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar

sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak. Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional :

Dari isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancsilanya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk :

- a. Memajukan kesejahteraan umum
- b. Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa
- c. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui :

- a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
- c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar
- d. Penyediaan lapangan kerja

2. Kebijakan Pemerintah

Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus saling mendukung.

Klasifikasi kebijakan ekonomi menurut tingkat agregasi atau ruang lingkup pengaruh/ sasaran

Selain itu kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir. Sasaran perantara tersebut mencakup lima hal utama :

- a. Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional)
- b. Distribusi pendapatan yang merata
- c. Kesempatan kerja sepenuhnya
- d. Stabilitas harga dan nilai tukar
- e. Keseimbangan neraca pembayaran

Lima sasaran ini erat kaitannya dengan masalah stabilitas ekonomi. Tiga macam kebijakan Ekonomi (menurut agregasinya) :

1. Kebijakan ekonomi mikro

Kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana

perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Contohnya :

- a. Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam perusahaan.
- b. Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi
- c. Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain.

2. Kebijakan Ekonomi Meso

Kebijakan ekonomi sektoral atau kebijakan ekonomi regional. Kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenagakerjaan dan sebagainya.

Kebijakan meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Misalnya kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia (KTI), yang mencakup kebijakan industri regional, kebijakan investasi regional dan sebagainya. Kebijakan ini bisa dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.

Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, penetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. (Tulus Tambunan, 1996).

Kebijakan ekonomi juga bisa dibedakan antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri.

1. Kebijakan Ekonomi dalam Negeri

- a. Kebijakan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri dan jasa-jasa
- b. Kebijakan keuangan negara, seperti perpajakan, bea cukai, anggaran pemerintah (APBN).
- c. Kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, perkreditan, pembinaan dan pengawasan bank.
- d. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja, jaminan sosial
- e. Kebijakan kelembagaan ekonomi, seperti BUMN, koperasi, perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah (UKM), dan lain-lain kebijakan.

2. Kebijakan hubungan ekonomi luar negeri
 - a. Kebijakan neraca pembayaran, seperti pengamanan cadangan devisa negara.
 - b. Kebijakan perdagangan LN, seperti tata-niaga (ekspor dan impor), perjanjian dagang antar negara.
 - c. Kebijakan penanaman modal asing, seperti perizinan investasi langsung, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan.
 - d. Kebijakan hutang LN, menyangkut hutang pemerintah, hutang swasta, perundingan/ perjanjian dengan para kreditor, dan lain-lain kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi teori dan praktik*. Jakarta:Erlangga.
- Armia, Chairuman, Perlukah BUMN Dipertahankan?, Harian “KOMpas” 5,6,7 Oktober 1989 (dalam Pandji Anoraga, 1995).
- Anoraga, Pandji, BUMN, Swasta danm Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi, PT. Duta Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 1982.
- Booth, Anne dan McCawley, Penyunting, Ekonomi Orde Baru, Terjemahan oleh Boedino, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Cawley, Peter Mc., “Pertumbuhan Sektor Industri”, dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley, ed., Ekonomi Order Baru, LP3ES, 1990.
- Djojohdikusumo, Soemitro, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Grenville , Stephen, “Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan Formal”, dalam Anne Booth dan Peter mc Cawley, ed., Ekonomi Order Baru, LP3ES, 1990.
- Kartili, J.A., Prof. Dr., Sumber Daya Alam, untuk pembangunan nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Notisastro, Wijoyo, “Landasan Ideal dan Masalah Operasional di Bidang Dimyati”, dalam Redaksi harian Kompas, ed., Mencari bentuk Ekonomi Indonesia, PT. Gramedia, jakarta. 1982.
- Santoso, Budi, “Dinamika dan Pertumbuhan Ekonomi rakyat dalam Perspektif Strategi Pembangunan”, dalam Daya Saing Perekonomian Indonesia Menyongsong Era Pasar Bebas, Diterbitkan dalam rangka Dies Natalis Universitas Trisakti ke-31, Media Ekonomi Publisng (MEP),.....
- Suroso, P.C., Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Sjahrir, “Kemiskinan, Keadilan dan Kebersamaan”, Makalah pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Ke-13, Medan, 1996.
- Sutjipto, E. “Suatu Ikhtisar Lembar Pengajaran Wawasan Nusantara”, dalam Bunga Rampai Wawasan Nusantara I, LEMHANAS, 1981.
- Soedarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1983.
- Tambun, Tulus T.H., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, 1996.
- Triyono Widodo, Suseno Hg., Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Penerbit Kanisius, 1995.

TENTANG PENULIS



Jeane Mantiri, SAB.,MAP, lahir di Manado 19 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Tahun 2005, S2 Manado Universitas Negeri Manado tahun 2014. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado sejak tahun 2015



Nancy Melisa Onibala,S.AP.,MPA, lahir di Manado 14 Oktober 1992. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Manado Tahun 2014, S2 Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Saat ini aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado

BUKU SISTEM EKONOMI INDONESIA INI DISUSUN SECARA KHUSUS SEBAGAI BAHAN AJAR MAHASISWA, JUGA DIHARAPKAN DAPAT MENJADI REFERENSI BAGI KALANGAN UMUM. DALAM BUKU INI MEMBAHAS TENTANG; KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA, SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA, TOKOH EKONOMI INDONESIA, SISTEM EKONOMI INDONESIA,, PERILAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA, KOPEEASI DAN UMKM, FORMASI STRUCTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-203-8



9 786231 472038